

Policy Brief

**STRATEGI MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KEBAHAGIAAN
RUMAH TANGGA PETANI**



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019**

Pendahuluan

1. Tingkat kesejahteraan seringkali diindikasikan dengan pendapatan sebagai salah satu komponen kesejahteraan. Secara teoritis, kebutuhan manusia dibagi berdasarkan kebutuhan: (1) fisiologis, (2) rasa aman, (3) sosial, (4) penghargaan, dan (5) aktualisasi diri. Semakin tinggi kesejahteraan, kebutuhan-kebutuhan ekonomis sebagai indikator kesejahteraan akan semakin berkurang. Manusia cenderung akan meninggalkan kebutuhan ekonomis menuju kebutuhan yang lebih bersifat sosial. Dalam realita kehidupan seseorang termasuk rumah tangga petani tidak hanya bertujuan meraih kesejahteraan, namun juga menginginkan kebahagiaan.

Permasalahan

2. Pemahaman secara baik tentang tingkat kebahagiaan rumah tangga petani belum banyak dikaji, oleh karena itu penting untuk menelaah tingkat kebahagiaan dan faktor-faktor penentu kebahagiaan rumah tangga petani. Selain itu, untuk dapat hidup sehat dan dapat beraktivitas, seseorang membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dalam jumlah maupun mutunya. Dalam hal demikian pemahaman yang baik terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga petani dan kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kebahagiaan dan atau kesejahteraan rumah tangga petani penting untuk dilakukan.

Temuan-temuan pokok

3. Pada tahun 2017 terjadi penurunan indeks kepuasan terhadap pekerjaan dan pendapatan, baik pada rumah tangga pertanian maupun nonpertanian, dibandingkan tahun 2014. Namun demikian, kenaikan indeks kebahagiaan pada rumah tangga pertanian lebih besar (3,0) dibandingkan pada rumah tangga nonpertanian (2,5).
4. Secara umum rumah tangga di Indonesia dan di empat provinsi penelitian baik pada rumah tangga pertanian maupun nonpertanian persentase yang sangat khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari relatif kecil. Pada rumah tangga pertanian, persentase yang khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari relatif lebih tinggi dibanding yang sangat tidak khawatir, kecuali di Provinsi Jambi. Untuk rumah tangga nonpertanian, persentase rumah tangga yang khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari lebih rendah dibanding yang sangat khawatir.
5. Rumah tangga pertanian memiliki strategi mengatasi kekhawatiran (terutama terhadap banyak produk impor pertanian) dengan cara menjaga mutu produk yang dihasilkan, mengusahakan produk unggul lokal, dan bergabung ke Asosiasi. Ketiga strategi tersebut merupakan tiga strategi yang dominan dilakukan rumah tangga pertanian dibanding dengan strategi yang lainnya.
6. Tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia termasuk rumah tangga pertanian mengalami penurunan, yang ditunjukkan dengan peningkatan pangsa pengeluaran pangan selama kurun waktu 2014-2017. Tingkat kesejahteraan rumah tangga

pertanian lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang bekerja di nonpertanian. Selain itu, perubahan yang terjadi pada kurun 2014-2017 adalah pangsa pengeluaran untuk karbohidrat menurun, sebaliknya pengeluaran makanan/minuman jadi mengalami peningkatan.

7. Sejalan dengan penurunan kesejahteraan, maka terjadi penurunan partisipasi konsumsi untuk pangan sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan lemak cenderung meningkat. Beras sebagai makanan pokok utama dan pertama. Pola ini tidak hanya pada rumah tangga petani yang menanam padi, tetapi juga rumah tangga yang menanam tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan petani yang mengusahakan ternak. Peranan pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat telah tergeser diganti dengan mi instan yang menggunakan bahan baku impor berupa gandum.
8. Selama kurun waktu 2014-2017, terjadi peningkatan konsumsi energi dan protein pada rumah tangga yang bekerja di pertanian dan nonpertanian. Tingkat konsumsi energi dan protein pada tahun 2017 sudah melebihi dari rata-rata konsumsi yang dianjurkan secara nasional. Peningkatan konsumsi energi pada tahun 2017 berdampak positif pada penurunan rumah tangga rawan pangan. Namun, penurunan proporsi rawan pangan pada rumah tangga pertanian lebih kecil dibandingkan nonpertanian.
9. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia adalah pangsa pengeluaran pangan dan pangsa konsumsi protein hewani, sementara itu proporsi rumah tangga rawan pangan tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kebahagiaan rumah tangga. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan yang dapat diartikan pula semakin rendah tingkat ketahanan pangan maka semakin rendah pula tingkat kebahagiaan rumah tangga di Indonesia. Untuk pangsa konsumsi pangan hewani, semakin tinggi pangsa konsumsi protein hewani semakin tinggi tingkat kebahagiaan rumah tangga.
10. Seluruh petani responden yang mengusahakan padi, tanaman perkebunan (kelapa, karet, kelapa sawit), tanaman hortikultura (bawang merah, cabai, sayuran, bunga) dan peternakan (sapi, kerbau, ayam ras petelur) menyatakan bahwa sebagai seorang petani akan bahagia apabila produksi yang dihasilkan bagus sesuai harapan, tidak ada kerusakan, dan harga produk yang dihasilkan tidak jatuh (rendah), sehingga ada keuntungan yang wajar dalam kegiatan usaha tani.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

11. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga petani, maka prioritas program-program terkait peningkatan kebahagiaan dan atau kesejahteraan rumah tangga perlu diarahkan pada rumah tangga pertanian tanpa mengabaikan rumah tangga nonpertanian. Untuk memaksimalkan manfaat program, cakupan program perlu disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga yang menjadi target program.
12. Upaya meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan petani melalui bantuan sarana produksi seperti benih/bibit, pupuk dan alsintan sangat bermanfaat bagi petani. Namun demikian, bantuan tersebut tidak selalu menciptakan kebahagiaan/kesenangan bagi petani dikarenakan umumnya bantuan yang diterima kurang sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi wilayahnya. Oleh karena itu, jenis bantuan ke depan perlu memperhatikan kondisi wilayah secara cermat (spesifik wilayah).
13. Khusus untuk bantuan benih padi yang selama ini dilakukan secara masif disarankan adanya konsistensi kebijakan pengadaan benih padi minimal lima tahun dengan mengoptimalkan keterlibatan penangkar benih yang sudah ada dan mengembangkan penangkaran benih secara korporasi. Hal ini sekaligus memungkinkan petani mendapat bantuan benih padi dengan varietas yang sesuai kebutuhan petani dan selera konsumen. Program Kostratani yang dinisiasi Kementerian Pertanian ke depan dapat menjadi wahana untuk mengimplementasikan program bantuan sesuai ketepatan jenis, spesifikasi kebutuhan dan kondisi wilayah. Implementasi Kostratani dapat mengotimalkan peran BPP yang ada di setiap kecamatan dapat dijadikan basis sumber data dan informasi dalam mengidentifikasi kebutuhan petani terkait inovasi teknologi sesuai kondisi wilayah.
14. Bantuan yang diberikan pemerintah kepada petani hendaknya tidak hanya bantuan yang berwujud fisik semata, namun juga mencakup kegiatan pendampingan pemberdayaan petaninya untuk menumbuhkan partisipasi petani secara aktif, menggiatkan gotong royong sebagai wujud kebersamaan, dan diharapkan pemanfaatan bantuan akan berkelanjutan. Pada akhirnya ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah akan terkikis, sehingga petani menjadi berdaya/mandiri.
15. Keresahan petani jika harga jual hasil produksi rendah, tidak mampu menutupi biaya usaha tani yang dikeluarkan. Masalah harga *output* ini sering dialami oleh petani padi, petani sayuran, petani pekebun dan peternak unggas (petelur/pedaging). Untuk itu, diusulkan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan skim subsidi, dari subsidi *input* ke subsidi harga *output*. Uji coba dapat dilakukan pada komoditas padi yang menjadi komoditas pangan pokok utama masyarakat.

16. Pertumbuhan usaha makanan dan minuman jadi terus meningkat dari tahun ke tahun dengan harga yang bervariasi dan mudah didapat baik di warteg, toko maupun supermarket. Situasi ini adalah suatu keniscayaan, namun yang perlu disikapi oleh rumah tangga adalah secara bijak dalam memilih dan memilah jenis makanan dan minuman jadi yang dikonsumsi. Aspek utama yang perlu menjadi perhatian adalah dampak kesehatan akibat mengonsumsi makanan tersebut. Rumah tangga tidak memilih makanan/minuman jadi yang ada zat pengawet, pengental, pemutih dan penyedap yang bukan untuk makanan karena zat-zat tersebut akan berdampak negatif terhadap kesehatan seseorang. Sosialisasi dan advokasi terus dilakukan melalui berbagai media (cetak, *online*, pertemuan PKK/kelompok, dan lainnya). Perubahan *mindset*/sikap seseorang adalah hal yang tidak mudah sehingga sosialisasi harus dilakukan secara masif, terukur dan berkelanjutan.
17. Peningkatan pangsa konsumsi protein hewani dan penurunan pangsa pengeluaran pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya diversifikasi konsumsi sekaligus merupakan instrument kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga petani. Untuk itu pemerintah diharapkan tetap harus terus menggalakkan program diversifikasi konsumsi pangan tidak hanya terbatas pada pangan sumber karbohidrat, namun juga diversifikasi pangan secara keseluruhan menuju pola konsumsi Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA). Diversifikasi konsumsi pangan sebagai upaya untuk mewujudkan konsumsi pangan berkelanjutan yang akan berdampak positif pada kesehatan tubuh dan kelestarian lingkungan. Diversifikasi konsumsi pangan ini perlu diselaraskan dengan diversifikasi produksi dan penyediaan bahan pangan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah sekaligus mendorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pangan lokal.
18. Data dan informasi tentang indikator kebahagiaan yang dikumpulkan oleh BPS secara periodik (setiap tiga tahun) dapat digunakan sebagai komplemen untuk mengukur kesejahteraan petani. Usulan kebijakan kepada BPS adalah: a) variabel sumber pendapatan dari pertanian dapat di *breakdown* lebih terinci menurut subsektor, b) menambah variabel kebahagiaan dengan memasukkan aspek konsumsi pangan dan pangsa pengeluaran pangan serta variabel yang terkait aspek kelaparan/kerentanan pangan. Analisis SPTK yang dilakukan BPS selain aspek gender dan wilayah, disarankan juga memilah rumah tangga menurut sumber pendapatan dengan membedakan rumah tangga pertanian dan rumah tangga nonpertanian. Hal ini didasarkan sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia masih di sektor pertanian. Selain itu, disarankan untuk mempertimbangkan sampling rumah tangga pertanian secara proporsional.